

Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 Di DKI Jakarta

Jacinda Labana. K¹, Fitri Nurul Aftitah^{2*}, Kamaliatun Hasanah³, Nur Lailatul Hadi. F. M⁴

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email; , 63220518@bsi.ac.id¹, 63220374@bsi.ac.id², 63220687@bsi.ac.id³,
63220536@bsi.ac.id⁴

Alamat; Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Jakarta 10450

Korespondensi penulis: 63220374@bsi.ac.id

Abstract. *The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is an annual financial plan regulated by local law, which functions to convey regional government priorities to the community. Regional expenditure consists of 3 main categories: personnel expenditure, expenditure on goods and services, as well as capital and other expenditures, which aim to improve community welfare. The APBD is the basis for regional development operations and a tool for evaluating organizational performance. Financial reports, which include balance sheets, budget realization reports (LRA), and notes to financial reports, provide important information regarding financial position and budget performance. Appropriate classification of regional expenditure is very important to prevent deterioration in people's welfare. Regional governments are committed to increasing the effectiveness of regional autonomy through accountable and transparent financial performance management. Accountability reports that are prepared periodically aim to ensure appropriate use of the budget, in accordance with the provisions in PP No. 71 of 2010, which emphasizes the importance of LRA as one of the objectives of government financial reporting.*

Keywords: *Regional Government Budget (APBD), Community Welfare, Budget Realization Report (LRA)*

Abstrak. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang diatur oleh undang-undang lokal, berfungsi untuk menyampaikan prioritas pemerintah daerah kepada masyarakat. Belanja daerah terdiri dari 3 kategori utama: pengeluaran pegawai, pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran modal dan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD menjadi dasar bagi operasi pembangunan daerah dan alat evaluasi kinerja organisasi. Laporan keuangan, yang mencakup neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan catatan atas laporan keuangan, memberikan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja anggaran. Klasifikasi pengeluaran daerah yang tepat sangat penting untuk mencegah kemunduran dalam kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas otonomi daerah melalui pengelolaan kinerja keuangan yang akuntabel dan transparan. Laporan pertanggungjawaban yang disusun secara berkala bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat, sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 71 tahun 2010, yang menegaskan pentingnya LRA sebagai salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kesejahteraan Masyarakat, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. LATAR BELAKANG

Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang diatur oleh undang-undang lokal. Setelah berkonsultasi dengan DPRD dan lembaga legislatif, pemerintah daerah dapat menggunakan APBD untuk memberitahu publik tentang prioritas yang diprioritaskan. Belanja Daerah terdiri dari 3 (Tiga) kategori pengeluaran utama yaitu, pengeluaran pegawai, Pengeluaran barang

dan/ atau jasa, modal dan pengeluaran lainnya. Belanja daerah ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang prioritas daerah yang dapat mempengaruhi pada kesejahteraan Masyarakat.

Anggaran adalah dasar operasi pembangunan pemerintah dan regional. Untuk stabilitas, keseimbangan dan pertumbuhan organisasi serta evaluasi kinerja, anggaran alat sangat penting. Pembaca laporan dapat menggunakan LRA salah satu contoh pertanggung jawaban keuangan yang paling dikenal, untuk menganalisis kinerja laporan keuangan, yang mencakup analisis pembiayaan, analisis belanja, dan analisis pendapatan.

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran menunjukkan perbandingan antara anggaran dan hasilnya, dan neraca menunjukkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Laporan keuangan yang disebutkan sebelumnya memberikan informasi tentang penjelasan dan keakuratan pos-pos yang dibahas.

Belanja daerah adalah pengeluaran yang digunakan untuk urusan public yang dikelola oleh kabupaten, kota atau provinsi. Urusan publik ini terdiri dari pilihan tugas yang ditetapkan secara hukum (Sasana, 2011). Pengeluaran daerah yang diklasifikasikan dengan benar berdasarkan kebutuhan rakyat, yang mencegah kemajuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kinerja keuangan. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan daerah, laporan pertanggung jawaban secara berkala dibuat untuk anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah, laporan ini menunjukkan apakah pemerintah telah menggunakan anggarannya dengan benar. Menurut PP No. 71 tahun 2010, salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan entitas pelaporan yang dibandingkan satu sama lain adalah pengertian dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA juga menunjukkan perbedaan antara jumlah anggaran pada awal periode dan jumlah anggaran pada akhir periode (Bastian, 2007:308).

2.2. Belanja

Pengeluaran, menurut akuntansi saat menyusun laporan keuangan, adalah semua biaya yang mengurangi dana lancar dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibayarkan kembali oleh pemerintah. Belanja dilakukan selama masa kas pengeluaran, biasanya melalui bendahara pengeluaran dan selama masa pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan dan disetujui oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Belanja diurutkan menurut jenis atau ekonomi belanja dan kemudian diurutkan menurut organisasi dan fungsi, yang akan dimasukkan ke dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK).

2.3. Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada sumber daya yang dialokasikan oleh daerah untuk didistribusikan dengan prinsip pemerataan dan harapan, yang dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi (Lontan & Pengerapan, 2016)

2.4. Belanja Operasi

Anggaran untuk operasi pemerintah pusat dan daerah, yang disebut operanten, biasanya dibuat secara internal dan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah bersangkutan dalam jangka pendek.

2.5. Fungsi Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi dalam Sari (2021:8), ada delapan (8) fungsi anggaran :

1. Anggaran sebagai perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
4. Anggaran sebagai alat politik dalam organisasi sektor publik'
5. Anggaran sebagai alat koordinasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
7. Anggaran sebagai alat motivasi
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dikarenakan penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari BPKP.go.id, Melalui pemanfaatan metodologi ini, dapat memahami keterkaitan antar variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan pemahaman yang dapat diandalkan terhadap fenomena yang diteliti.

3.2. Sampel

Dalam penelitian ini, contoh yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah DKI Jakarta Anggaran Tahun 2023. Dengan menggunakan data dan informasi dari Laporan Keuangan Audited BPKP, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas kerja di wilayah tersebut.

3.3. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan antara belanja yang telah direalisasikan dengan anggaran yang telah ditetapkan, Berikut adalah rumus yang digunakan adalah rumus dari Mahmudi (2015;157) :

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

3.4. Analisis Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah

Dilakukan dengan membandingkan total belanja operasi dengan total belanja daerah, analisis belanja operasi dalam kaitannya dengan total belanja memberikan informasi tentang proporsi belanja daerah yang digunakan untuk belanja operasi. Pengeluaran bersifat rutin atau berulang, bersifat jangka pendek, dan sering kali berulang, disebut belanja operasi.

Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Total Belanja Daerah

Kriteria Belanja Operasi

| Kriteria Belanja Operasi | Persentase Belanja Operasi |
|--------------------------|----------------------------|
| Baik | Dibawah 40% |
| Cukup Baik | 40%-80% |
| Kurang Baik | 80%-100% |

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Varians Belanja

Tabel 2. Analisis varians Belanja Tahun Anggaran 2023

| Tahun | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Selisih (Rp) | % | Penyerapan Belanja |
|-------|----------------|----------------|--------------|---------|--------------------|
| | (a) | (b) | (c=a-b) | (d=c/b) | (e=a/b) |
| 2023 | 29.201.210.665 | 29.539.300.000 | 338.089.335 | 1,15% | 98,85% |

Menurut tabel 2, perbedaan antara hasil Realisasi dan Anggaran pada tahun 2023 sebesar 338.089.335 atau 33,80%. Oleh karena itu, anggaran belanja tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai variabel yang menguntungkan (Selisih disukai) jika hasilnya lebih rendah dari anggaran.

4.2. Analisis Rasio Belanja Operasi

Rasio ini memberikan gambaran tentang bagian dari belanja daerah yang diatur untuk belanja operasi. Perbandingan antara total belanja daerah dan belanja operasi ditunjukkan berikut:

| Kode Jenis Barang | Jenis Barang | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 51 | Belanja Pegawai | 22.536.784.000 | 22.430.873.818 | 99,53 |
| 52 | Belanja Barang | 6.437.036.000 | 6.207.731.238 | 96,44 |
| Total | | 28.973.820.000 | 28.638.605.119 | |
| 53 | Belanja Modal | 565.480.000 | 562.605.546 | 99,49 |
| Total | | 29.539.300.000 | 29.201.210.665 | |

$$\text{Tahun 2023} = \frac{28.973.820.000}{29.539.300.000} \times 100\% = 98,08\%$$

Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah tahun 2023 sebesar 98,08%. Dari analisis rasio ini terlihat bahwa belanja operasi dikatakan kurang baik karena diatas 80%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menurut hasil analisis yang telah diselsaikan, kinerja belanja pemerintah DKI Jakarta dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasi, yang berjumlah 338.089.335, dan rasio belanja operasi yang berjumlah 98,08%, yang dianggap buruk. Meskipun terdapat selisih anggaran yang positif, tetap perlu adanya perhatian lebih pada alokasi belanja daerah untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan daerah terakomodasi dengan baik. Dengan melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik, maka belanja daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, M. Satyo Utomo. Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemda DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. 2(3).
- Asiah, Nur Nasution. (2024). Kontribusi Belanja Pegawai Serta Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Belanja Operasi Pemerintah Kota Medan. *Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. *Jakarta: BPKP*.
- Hartoto, Sugiri, Dani, Meutia, Rita, Sriyani, Ludfi, Riswan, M., Jahanna Luhukay, Muliyani, Agustina, Rizqi, Wia Amalia, Victor, Hans Sitepu, Shintia, Ribka Febriarti Bonara, Nurdialy, Mela, Sembiring, Darmawanta, Darwanis, Yandri, Mesak Masala, Rosyanti, Novi, Djasuli, Mohamad. (2023). Akuntansi Pemerintah. *Bandung: Widina Media Utama*.
- Ibrahim, Sulistianto, Digdowiseiso, Kumba. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*. 10(2).

- Rofiq, Inul,. Indra, Fefri Arza,. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai Dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 3(3).
- Syamsuddin, Indah,. Nurjannah, Putri Muhammad,. Karim, Abdul. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *Jurnal Manajemen*. 5(2).
- Yunita, Grace Liando,. Elim, Ingriani. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA*. 4(1).